



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**UNIT KERJA** : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUSIANTO  
2. Jabatan : KEPALA BIDANG  
3. NHK : 870568

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 367 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 259.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000  
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000  
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000  
4. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.250.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 966.250.000

**III. HUTANG** Rp. 245.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 721.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.